



**PENGATURAN WAKAF TUNAI CALON PENGANTIN DALAM
KERANGKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Hukum

Oleh :

Hanifa Aini

2520111001



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

PENGATURAN WAKAF TUNAI CALON PENGANTIN DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hanifa Aini, 2520111001, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 205 halaman, 2026, Pembimbing: Dr. Yasniwati, S.H., M.H., dan Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam hukum positif Indonesia, wakaf uang termasuk kategori wakaf yang diakui dan diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diinternalisasi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 tahun 2002. Seiring dinamika perwakafan nasional, muncul program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC) yang diprakarsai oleh Perwakilan BWI Sumatera Barat dan kemudian diadopsi oleh 16 provinsi lain. Pelaksanaannya secara umum masih mengacu pada kerangka umum wakaf uang dalam UU Wakaf dan peraturan turunannya tanpa adanya norma khusus yang mengatur WTC, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada sejumlah unsur pokok program ini. Dalam praktiknya, penghimpunan dana WTC masih terbatas dan hasil manfaatnya belum terdistribusikan kepada masyarakat secara nyata, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan program belum terealisasi. Kondisi tersebut merefleksikan urgensi penguatan regulasi WTC dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan hukum WTC sebagai program wakaf uang dalam hukum positif Indonesia? dan (2) Bagaimana pencapaian *mashlahah* melalui WTC? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deskriptif, dengan perolehan data melalui studi dokumen dan wawancara. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Posisi Wakaf Tunai Calon Pengantin berpayung pada UU Wakaf dan turunannya, namun masih belum jelas peraturan teknisnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ruang perbaikan yang perlu segera diatur khusus. 2) Secara substansial, WTC selaras dengan *maqashid syariah* karena berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, namun dalam praktiknya *mashlahah* belum terwujud secara nyata akibat ketidakpastian hukum pedoman pelaksanaan, rendahnya literasi wakaf, kurangnya transparansi, dibenturkannya WTC dengan pungutan liar, dan belum terdistribusikannya manfaat secara pasti. Disarankan agar WTC dilengkapi dengan regulasi teknis yang mempedomani hukum wakaf nasional, dengan keterlibatan BWI, Kementerian Agama untuk memastikan pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan, serta penerapan konsep *mashlahah mursalah* sebagai landasan penyusunan regulasi yang berorientasi pada kebutuhan keluarga berupa Peraturan BWI, Surat Edaran, dan juklak serta juknis WTC. Perlu juga dukungan optimalisasi peran BWI, Kemenag, dan Perwakilan BWI, serta penguatan transparansi melalui *dashboard real time* sejenis Satu Wakaf agar WTC menjadi instrumen wakaf yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf, WTC, Kepastian Hukum, *Mashlahah*, Ketahanan Ekonomi Keluarga.

REGULATIONS OF PROSPECTIVE BRIDES AND GROOMS CASH WAQF WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

Hanifa Aini, 2520111001, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Andalas, 205 pages, 2026, Advisor: Dr. Yasniwati, S.H., M.H. and Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

According to Indonesian law, specifically Act No. 41 of 2004, cash waqf is permitted, following the 2002 ijthad and fatwa of the Indonesian Ulema Council. The Cash Waqf for Prospective Brides and Grooms (WTC), started by West Sumatra BWI and later adopted by 16 provinces, follows the Waqf Law's general rules but lacks specific regulations. This creates legal uncertainty over key aspects of the program. As a result, WTC collections are limited and benefits have not been distributed effectively, so the program has not achieved its intended public-welfare impact. These conditions reflect the urgency of strengthening WTC regulations within the framework of Islamic law and Indonesian positive law; thus, the issues examined in this study are: (1) How is the legal status of WTC as a cash waqf program under Indonesian positive law? and (2) How is public benefit achieved through WTC? This research is a normative study that uses a legislative and conceptual approach, as well as a descriptive method, with data collected through document analysis and interviews. The conclusions of this study indicate that: 1) The normative status of WTC remains unclear, leading to legal uncertainty and gaps that need to be addressed immediately. 2) Substantively, WTC aligns with maqashid syariah as it is oriented towards strengthening family economic resilience. However, in practice, this masalah has not been realised due to unclear guidelines for implementation, low wakaf literacy, a lack of transparency, conflicts with extortionate fees, and the failure to distribute benefits effectively. It is recommended that the WTC be supported by technical regulations aligned with national waqf law, involving BWI and the Ministry of Religious Affairs to ensure focused and sustainable implementation, and that the concept of mashlahah mursalah serve as the foundation for drafting family-oriented regulations, such as BWI decrees, circular letters, and operational guidelines (both general and technical) for the WTC. Additionally, the optimisation of the role of the BWI, the Ministry of Religious Affairs, and the BWI representatives, as well as the strengthening of transparency through a real-time dashboard similar to the 'SatuWakaf' system, is necessary for the WTC to become a beneficial and sustainable wakaf instrument.

Keywords: *Waqf, WTC, Legal Certainty, Mashlahah, Family Economic Resilience.*